

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki kualitas informasi akuntansi yang kurang baik. Informasi yang kurang baik tersebut tidak dapat diandalkan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan setelah periode pelaporan (Bastian, 2010). Rendahnya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sedikitnya pemerintahan daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK. Hal tersebut dapat dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BPK pada bulan September 2012 yang memeberikan informasi bahwa hanya 12% kabupaten dan 25% kota atau sebanyak 36 kabupaten dan 21 kota dari 313 kabupaten dan 85 kota di LKPD yang diaudit oleh BPK yang memperoleh opini WTP. Menurut BPKP tidak diperolehnya opini WTP disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/ daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

LPKD merupakan gabungan dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh

SKPD – SKPD yang ada pada daerah tersebut, dengan kata lain jika kualitas LKPD kurang baik hal tersebut merupakan cerminan kurang baiknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan SKPD pada daerah tersebut.

Pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait berusaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, hal tersebut tercermin dengan dikeluarkannya PP 71 tahun 2010 yang menggantikan PP 24 tahun 2005 dengan mengubah basis akuntansi menjadi basis akrual guna meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan. Menurut Christensen (2002) menyatakan reformasi akuntansi pemerintahan menjadi langkah pertama dari kebijakan modernisasi pemerintah untuk organisasi publik. Oleh karena itu, pelaksanaan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi memainkan peran penting dan dominan dalam pelaksanaan dan keberhasilan *New Public Management* (NPM) berikutnya praktik dan teknik dalam organisasi publik. Jika reformasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang dirasakan maka tujuan dan harapan memasyarakatkan reformasi tersebut akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung dan memfasilitasi mereka dalam pengambilan keputusan (Christensen, 2002).

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol yang menghasilkan informasi internal. Rostami dan Mongadam (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai

pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat SIA yang terintegrasi dengan TI yang digunakan oleh organisasi dalam pengolahan data yang ada tidak berjalan dengan baik dapat menghasilkan *output* yang dapat melemahkan kinerja dari organisasi tersebut. Devi (2013) menyatakan bahwa Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun

2006 mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. BPKP dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang diberinama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan Devi (2013) pada SKPD yang ada di lingkungan PEMKAB

Kulon Progo menemukan bahwa:

- a. SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi pemda secara maksimal.
- b. Kurangnya kesiapan SKPD menerima dan mengaplikasikan *software* keuangan terintegrasi seperti SIMDA untuk melakukan prosedur akuntansi.
- c. Belum adanya kepastian tentang *software* yang dijadikan standar (*default software*) dalam prosedur akuntansi, yang menyebabkan masih beragamnya bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, hal ini jelas menyulitkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam hal pengambilan keputusan.
- d. Kemampuan penguasaan pengoperasian SIMDA yang belum merata di setiap SKPD, *software* ini menuntut penggunaanya tidak hanya fasih dalam akuntansi tetapi juga dalam penggunaan komputer.
- e. Masih banyak ditemukan pegawai SKPD yang lebih memilih menggunakan kertas kerja manual atau dengan Ms.Excell untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dirasa lebih mudah daripada menggunakan SIMDA.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Alfian (2014) yang melakukan penelitian pada SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang meneliti mengenai faktor – faktor yang mendukung implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas data input dan Tingkat pemahaman pengguna mengenai SIMDA merupakan faktor pendukung

dari implementasi SIMDA namun tidak dengan dukungan manajemen puncak yang tidak terbukti sebagai faktor pendukung implementasi SIMDA dan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di SKPD yang ada di Kabupaten kulon progo. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian Al-Hiyari, *et all*

(2013) yang melakukan penelitian mengenai faktor pendukung implementasi SIA dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian tersebut adalah dukungan manajemen puncak dan kualitas data input merupakan faktor pendukung implementasi SIA dan berpengaruh pada kualitas informasi dan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012). Dari penelitian Al-Hiyari (2013) dan Alfian

(2014) terdapat perbedaan pada faktor pendukung implementasi SIA, Alfian (2014) menguji pengaruh dukungan manajemen puncak, kualitas data input dan tingkat pemahaman pengguna terhadap SIMDA, dan hasilnya hanya Kualitas data input dan Tingkat pemahaman pengguna yang terbukti sebagai faktor pendukung implementasi SIMDA, sedangkan Al-Hiyari (2013) menguji pengaruh dukungan manajemen puncak dan kualitas data input terhadap implementasi SIA, dan hasilnya adalah dukungan manajemen puncak dan kualitas data input berpengaruh terhadap implementasi SIA. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah Alfian (2014) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak bukan merupakan faktor pendukung implementasi SIMDA, sedangkan Al-Hiyari, *et all* (2013) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak merupakan faktor pendukung implementasi implementasi SIA. Selain

perbedaan tersebut, Alfian (2014) menambahkan variabel Tingkat pemahaman pengguna yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap implementasi SIMDA dan hasilnya terbukti bahwa tingkat pemahaman pengguna merupakan faktor pendukung implementasi SIMDA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh AlHiyari, *et all* (2013) dan Rahayu (2012) adalah penambahan variabel tingkat pemahaman pengguna seperti halnya yang dilakukan Alfian (2014). Sedangkan dengan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2014) adalah perbedaan pada obyek penelitian, Alfian (2014) melakukan penelitian pada SKPD yang berada pada Kabupaten yang tidak mendapatkan opini WTP untuk LKPD terbaru, sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih kota yang memperoleh opini WTP pada LKPD terbaru. Perubahan obyek penelitian dilakukan karena dimungkinkan terdapat perbedaan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul **“Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah Sampel penelitian yang diambil oleh peneliti sebagai obyek penelitian hanya pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta saja.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan dalam lingkungan pemerintah daerah tersebut. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut diharapkan informasi akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang ada pada organisasi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman pengguna mengenai SIMDA berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA?
2. Apakah kualitas data *input* berpengaruh positif pada implementasi SIMDA?
3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh positif pada implementasi SIMDA?

4. Apakah implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD?

D. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk membantu pencapaian tujuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan: Untuk mengetahui faktor pendukung implementasi SIMDA pada SKPD dan menguji adanya pengaruh implementasi SIMDA pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pada lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam mengoperasikan SIMDA. Selain itu, pemerintah

Kota dapat meningkatkan kemampuan individu dalam penggunaan SIMDA pada aktivitas sehari-hari sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah terlaksana dengan baik salah satunya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh penerapan sistem informasi, terutama sistem

informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan SIMDA pada pemerintah Kota Yogyakarta dan pengaruhnya terhadap kualitas informasi akuntansi. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi.